



Nalar Kewarganegaraan

Konstruksi Epistemologis

Civic Education



Fadil Mas'ud, S.Sos., S.H., M.Hum | Meryana M. Doko, S.H., M.Pd
Hendrika Bulu Uhen | Karolina Celsia Kuma | Victoria Abu
Clara Gabriella Teroci Niron | Wisri Tameon | Belinda Eunike fallo
editor: Daud Yefkanius Nassa, S.Pd., M.Pd.

NALAR KEWARGANEGARAAN

Konstruksi Epistemologis Civic Education

Penulis:

Fadil Mas'ud, S.Sos., S.H., M.Hum

Meryana M. Doko, S.H., M.Pd.

Hendrika Bulu Uhen

Karolina Celsia Kuma

Victoria Abu

Clara Gabriella Teroci Niron

Wisri Tameon

Belinda Eunike fallo

Editor:

Daud Yefkanus Nassa S.Pd., M.Pd



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

NALAR KEWARGANEGARAAN

Konstruksi Epistemologis Civic Education

**Fadil Mas'ud, S.Sos., S.H., M.Hum | Meryana M. Doko, S.H., M.Pd.
Hendrika Bulu Uhen | Karolina Celsia Kuma | Belinda Eunike fallo
Victoria Abu | Clara Gabriella Teroci Niron | Wisri Tameon**

EDITOR :
Daud Yefkanus Nassa S.Pd., M.Pd

TATA LETAK:
Sari

DESAIN SAMPUL:
Adhar

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-634-279-150-9 (PDF)

CETAKAN PERTAMA:
Juni 2026

UKURAN:
142 Hal; 17,6 cm x 25 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan penyertaan-Nya, buku yang berjudul “*Nalar Kewarganegaraan: Konstruksi Epistemologis Civic Education*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk perhatian terhadap pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membangun cara berpikir, bersikap, dan bertindak warga negara yang kritis, bijaksana, serta memiliki kepedulian terhadap kehidupan bersama.

Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, masyarakat tidak hanya dituntut untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi juga perlu memiliki nalar kewarganegaraan yang baik. Nalar kewarganegaraan membantu setiap individu untuk mampu berpikir secara rasional, menghargai perbedaan, menjunjung nilai kemanusiaan, serta membangun kehidupan demokratis yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana pendidikan kewarganegaraan dibangun secara epistemologis, yaitu dari cara pengetahuan tentang kewarganegaraan dipahami, dikembangkan, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar dapat dibaca oleh mahasiswa, pendidik, maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan dan kehidupan berbangsa. Penulis berusaha menghadirkan pembahasan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dekat dengan realitas sosial yang dialami masyarakat. Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat memahami bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan sekadar mata pelajaran, melainkan proses membangun kesadaran kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh sebab itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta menjadi salah satu sumber inspirasi dalam membangun generasi yang memiliki karakter kebangsaan, semangat demokrasi, dan rasa kemanusiaan yang kuat.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan dalam proses penyusunan buku ini.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bagian kecil dari upaya bersama untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis, dan berkeadaban.

Kupang, Mei 2026

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi	3
Bab 1 Pendahuluan: Persimpangan Epistemologi dan Pendidikan Kewarganegaraan.....	5
1.1 Konsep Dasar Etismologis dalam Rana Ilmu Sosial dan Pendidikan	5
1.2 Hakikat, Konsep, dan Tujuan Hakiki <i>Civic Education</i>	9
1.3 Mendefinisikan"NalarKewarganegaraan": Antara Kognisi, Karakter, dan Tindakan	12
1.4 Urgensi dan signifikansi dekonstruksi epistemologis pendidikan kewarganegaraan di era	14
Bab 2 Akar genealogis nalar kewarganegaraan.....	17
2.1 Tradisi klasik: konsepsi kewarganegaraan di era yunani dan romawi kuno	18
2.2 Era Pencerahan (Enlightenment) dan Lahirnya Nalar Kewarganegaraan Modern	23
2.3 Lintas Sejarah: Evolusi Politik-Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia	27
Bab 3 Paradigma dan Aliran Filsafat dalam Civis Education	40
3.1 Pergeseran positivisme dan pendekatan hukum-konstitusional dalam kewarganegaraan	40
3.2 Konstruktivisme Sosial: Warga Negara sebagai Aktor Pembentuk Realitas	42
3.3 Teori Kritis (Critical Theory) dan Dekonstruksi Kemapanan Kekuasaan	44
3.4 Pragmatisme John Dewey: Demokrasi sebagai Pengalaman Edukatif Bersama	49
Bab 4 Epistemologi kurikulum: mengonstruksi pengetahuan kewarganegaraan	55
4.1 Pragmatisme anatomi kurikulum civis education: tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi	56
4.2 Politik pengetahuan: siapa yang menentukan validitas materi kewarganegaraan	59
4.3 Integrasi tiga pilar utama: nilai moral, polotik, dan hukum dalam materi ajar	61
4.4 membongkar kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) dalam pendidikan kewarganegaraan	65
Bab 5 Epistemologi kurikulum: mengonstruksi pengetahuan kewarganegaraan	69
5.1 Relasi Kuasa dan Otoritas Epistemik dalam Proses Pembelajaran Kewarganegaraan	70
5.2 Dari Indoktrinasi Menuju Liberasi: Menggugat Metode Konvensional (<i>Banking Concept</i>)	74
5.3 Dialog dan Inkuiri Sosial sebagai Basis Pembentukan Nalar Kritis	78
5.4 Praksis Pembelajaran: Menjembatani Teks Normatif dengan Konteks Realitas Sosial	85
Bab 6 Nalar Kewarganegaraan di Tengah Disrupsi Kontemporer	93

6.1 Ketegangan Epistemik: Nasionalisme vs Kosmopolitanisme (Kewarganegaraan Global)	94
6.2 Era Post-Truth (Pasca-Kebenaran) dan Ancaman terhadap Rasionalitas Warga Negara	97
6.3 Epistemologi Kewarganegaraan Digital (Digital Citizenship) dan Transformasi Ruang Publik	100
6.4 Polarisasi Sosial dan Peran Civic Education sebagai Resolusi Konflik Kultural	103
Pustaka	122

Bab 1

Pendahuluan: Persimpangan Epistemologi dan Pendidikan Kewarganegaraan

Esensi Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) sejatinya tidak hanya terfokus pada penyampaian informasi tentang hukum, negara, dan konstitusi, tetapi juga merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kesadaran kritis, karakter moral, serta kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Dalam kerangka ini, Pendidikan Kewarganegaraan harus dimaknai sebagai suatu proses yang menyeluruh antara pengetahuan (pengetahuan kewarganegaraan), sikap (disposisi kewarganegaraan), dan keterampilan (keterampilan kewarganegaraan), sehingga siswa tidak hanya memahami apa yang benar secara normatif, tetapi juga dapat menghayati nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Studi dalam jurnal Indonesia mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan krusial dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa melalui praktik kewarganegaraan yang relevan, alih-alih hanya pembelajaran teoritis (Wulandari & Tanjung, 2021). Civic Education juga berperan sebagai alat utama dalam pengembangan karakter, seperti tanggung jawab, moralitas, dan kepedulian sosial, yang merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Nuraida Nuraida, 2023). Selanjutnya, dalam konteks Kurikulum Merdeka, pendidikan kewarganegaraan ditujukan untuk membentuk sikap kewarganegaraan, yaitu civic disposition yang mencakup cinta tanah air, penghargaan terhadap keberagaman, serta komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa (Nasution & Rambe, 2023).

1.1 Konsep Dasar Epistemologis dalam Rana Ilmu Sosial dan Pendidikan

Epistemologi sebagai subjek filsafat yang membahas tentang sifat pengetahuan memiliki peran yang sangat mendasar dalam kemajuan ilmu sosial dan pendidikan. Dalam konteks ini, epistemologi tidak sekadar dilihat sebagai studi konseptual tentang "apa itu pengetahuan", tetapi juga berkaitan dengan cara manusia

mendapatkan pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu dibenarkan, serta bagaimana keabsahannya diuji dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang sosial dan pendidikan, epistemologi berperan sebagai dasar utama untuk menetapkan arah pemikiran, metode penelitian, serta cara memahami realitas sosial yang rumit. Maka dari itu, memahami epistemologi bukan hanya sekadar kebutuhan teoritis, tetapi juga menjadi kebutuhan praktis bagi setiap orang yang terlibat dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu sosial (Saputra et al., 2026).

Dalam bidang ilmu sosial, epistemologi berfungsi untuk menerangkan bagaimana realitas sosial dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak selalu bersifat objektif dan tunggal. Realitas sosial sering kali bersifat dinamis, kontekstual, dan dipengaruhi oleh berbagai elemen seperti budaya, sejarah, dan hubungan kekuasaan. Dengan demikian, pendekatan epistemologis dalam ilmu sosial cenderung bervariasi, dari positivisme yang menekankan objektivitas dan pengukuran empiris, sampai konstruktivisme yang memandang pengetahuan sebagai produk konstruksi sosial. Keberagaman metode ini menunjukkan bahwa pengetahuan dalam ilmu sosial tidak bisa dipahami secara sederhana, tetapi harus dipandang sebagai hasil interaksi antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Dalam ranah pendidikan, epistemologi berperan sebagai landasan untuk menentukan bagaimana seharusnya berlangsung proses belajar dan mengajar. Pendidikan berperan tidak hanya sebagai pengalihan pengetahuan, tetapi juga sebagai pembentukan pola pikir kritis dan reflektif. Epistemologi mendukung pendidik dalam menyadari bahwa setiap siswa mempunyai cara yang unik dalam memahami pengetahuan. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang diterapkan harus dapat menyesuaikan dengan keberagaman tersebut. Ini menunjukkan bahwa epistemologi memiliki dampak langsung pada praktik pendidikan, terutama dalam membangun proses pembelajaran yang lebih inklusif dan bermakna.

Selain itu, epistemologi juga sangat terkait dengan proses verifikasi pengetahuan. Dalam ilmu sosial dan pendidikan, pengesahan pengetahuan tidak hanya dilakukan dengan metode ilmiah yang ketat, tetapi juga melalui refleksi kritis dan diskusi. Pengetahuan dianggap sah bukan hanya karena didukung oleh data empiris, tetapi juga karena relevansinya dengan konteks sosial serta kemampuannya memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah yang nyata. Oleh sebab itu, epistemologi dalam ilmu sosial dan pendidikan menekankan perlunya keseimbangan antara objektivitas dan subjektivitas untuk memahami kebenaran.

Salah satu elemen krusial dalam epistemologi adalah asal pengetahuan. Dalam bidang sosial dan pendidikan, pengetahuan bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk pengalaman empiris, akal, tradisi, dan bahkan insting. Setiap sumber informasi memiliki keunggulan dan batasan yang berbeda-beda. Contohnya, pengalaman empiris menyajikan data yang nyata, namun sering kali terbatas pada situasi tertentu. Rasio memungkinkan generalisasi, tetapi bisa terputus dari kenyataan